



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI Jumat, 26 Januari 2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

Anang Ma'ruf Resmi Dilantik Sebagai PAW Anggota DPRD, Gantikan Atok Ashari



SAH: Ketua DPRD Sidoarjo Usman menyematkan pin sebagai tanda anggota DPRD kepada Anang Ma'ruf.

KOTA-DPRD Sidoarjo kembali melaksanakan pengambilan sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota sisa masa jabatan 2019-2024. Kader PKS Anang Ma'ruf dilantik secara resmi menggantikan Atok Ashari sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Prosesi tersebut dipimpin dengan khidmat oleh Ketua DPRD Sidoarjo Usman.

Setelah pengucapan sumpah, tanda resmi pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.

Kesempurnaan acara dirajut dengan penyematan PIN anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo kepada Anang Ma'ruf. Simbolisasi itu menggambarkan dimulainya perjalanan masa jabatan baru yang dipenuhi tanggung jawab.

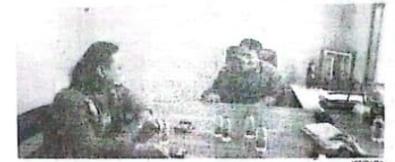
Dalam sambutannya, Usman mengucapkan selamat kepada Anang Ma'ruf sambil menekankan urgensi pemahaman tugas sebagai wakil rakyat.

Usman juga menitipkan harapan agar Anang Ma'ruf mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, baik dalam lingkup pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Kami berharap semua pihak bersinergi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sidoarjo," katanya.

Sebagai tanda akhir, Usman secara simbolis menyematkan pin DPRD Sidoarjo kepada Anang Ma'ruf. Menandai langkah awal yang penuh harapan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Sidoarjo yang baru. (nis/vga)

Pelapor Kecewa



TN berambut gondrong saat dikantor Bawaslu Rabu(24/1/24).

Bawaslu Limpahkan ke Dinas PMD

SIDOARJO - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo telah merekomendasikan adanya pelanggaran hukum lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Salah satunya yang dilakukan oleh Badan Penyelenggaraan Desa (BPD) Kecamatan Krembung Sidoarjo ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan ataupun pemberian sanksi maupun tindakan. Atas hal ini pelapor atas nama TN merasa kecewa dan mendatangi kantor dinas PMD

"Pelanggaran pemilu itu ada empat jenis yaitu pelanggaran administratif, kode etik penyelenggaraan pemilu, tidak pidana pemilu dan terakhir adalah pelanggaran hukum lain terkait dengan penyelenggaraan pemilu," jelas Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo, Moeh Arief, S.Sos kepada sejumlah jurnalis di Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Rabu (24/1/24) kemarin.

Arief menjelaskan Bawaslu telah melakukan koordinasi dan melakukan rapat pleno terkait laporan dugaan politik praktis yang dilakukan oleh BPD Kecamatan Krembung. Dimana ada undangan atas nama Forum Badan Masyarakat Desa (FBPD) Kecamatan Krembung dengan ketua Teguh Santoso telah mengundang seluruh pengurus RT dan RW se-Kecamatan Krembung untuk menghadiri acara serap aspirasi dan pembagian seragam yang dihadiri oleh Anik Maslachah selaku calon legislatif DPRD Provinsi dari partai PKB dengan agenda bertanggal 7 Januari 2024 kemarin.

"Ini masalah pelanggaran netralitas dan kami sudah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo selaku dinas yang mengayomi BPD untuk dapat dilakukan sanksi tindakan. Karena setelah rapat pleno di Bawaslu didapatkan kesepakatan bahwa itu termasuk pelanggaran hukum lainnya terkait dengan

Komisi C Pelajari Konsep Smart City ke Kota Banjarbaru

KOTA-Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru. Bertempat di Aula Johan Arifin Diskominfo, kunjungan itu difokuskan pada pemahaman implementasi konsep Smart City yang sukses diterapkan di

Kota Banjarbaru. Dalam upayanya menjadi salah satu kota yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Kota Banjarbaru menjadi rujukan bagi daerah lain. Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Suwarno menegaskan, tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mendapatkan pemah-

man lebih mendalam terkait strategi dan inovasi yang telah diterapkan oleh Diskominfo Banjarbaru. Menurut dia, hal itu penting dalam merancang langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemkot Banjarbaru dalam menerapkan konsep Smart City. "Kami ingin belajar dari pengalaman sukses Kota Banjarbaru, agar dapat

kami terapkan di Sidoarjo demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Kunjungan itu juga sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota DPRD Sidoarjo terkait upaya mewujudkan Kota Cerdas (Smart City). Diskominfo Kota Banjarbaru menjadi pusat inspirasi bagi implementasi tek-

nologi informasi dalam pelayanan publik dan pelayanan masyarakat. Diharapkan, hasil kunjungan dapat membuka wawasan dan memberikan pandangan baru bagi DPRD Sidoarjo dalam mengambil langkah-langkah menuju masyarakat yang lebih sejahtera melalui konsep Smart City. (nis/vga)

Masih Tuntaskan Instalasi Lampu

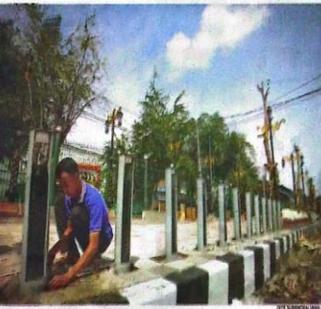
Proyek Taman Pedestrian di Kawasan GOR

SIDOARJO - Proyek taman pedestrian di sepanjang Jalan Poni hingga Jalan Patihawan di depan GOR Gelora Delta, Sidoarjo, tak kunjung tuntas. Kini masih meniscayakan pemasangan instalasi lampu penerangan jalan umum (PJU).

Kahid Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Hery Santoso menyebut secara fisik pekerjaan sudah tuntas. "Sekarang pemasangan instalasi lampu, kurang itu saja," katanya. Hery mengakui ada kendala sehingga pengerjaan terlambat dari jadwal. Yakni, terkait pemasangan instalasi kelistrikan lampu PJU yang juga sebagai hiasan di sepanjang trotoar tersebut. "Tengagayanya yang mengerjakan

kurang. Kami sudah minta tambah tenaga," ungkapnya. Selain itu, pemasangan instalasi tersebut butuh tenaga profesional dan cukup memakan waktu. Pemasangannya tidak boleh terpisah di tiap titik karena berkaitan dan jadi kesatuan. Karena itu, pelaksana pengerjaan taman tersebut meminta tambahan waktu pengerjaan. Sebelumnya, pihak pelaksana meminta perpanjangan

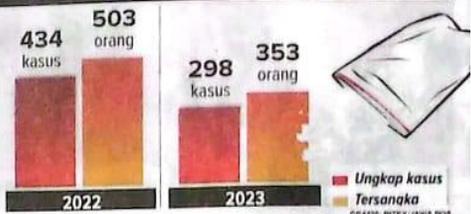
waktu pengerjaan hingga 20 hari. Namun, ternyata belum tuntas. Karena itu, pelaksana kembali meminta tambahan waktu pengerjaan. "Akhir Januari ini targetnya sudah selesai," ujarnya. Karena terlanjut, sesuai aturan, pelaksana bakal kena penalti denda keterlambatan. "Denda dihitung tiap hari. Semakin lama selesai, dendanya akan semakin banyak," pungkasnya. (uzi/cl7/amy)



MASIH MOLOR: Pekerja memasang instalasi listrik di taman area Gelora Delta Sidoarjo kemarin. Pelaksana proyek meminta tambahan waktu hingga akhir bulan.

SIDOARJO DALAM ANGKA

Kasus Narkoba yang Ditangani Satresnarkoba



Kasus Narkoba Menurun

TINGKAT pengungkapan perkara pada 2023 mengalami penurunan 39,65 persen, sedangkan untuk tersangka penurunan sekitar 29,8 persen. Perkara selama 2023 didominasi transaksi sabu-sabu dan pil koplo. (eza/c19/any)

Lantik Anggota KPPS Se-Sidoarjo

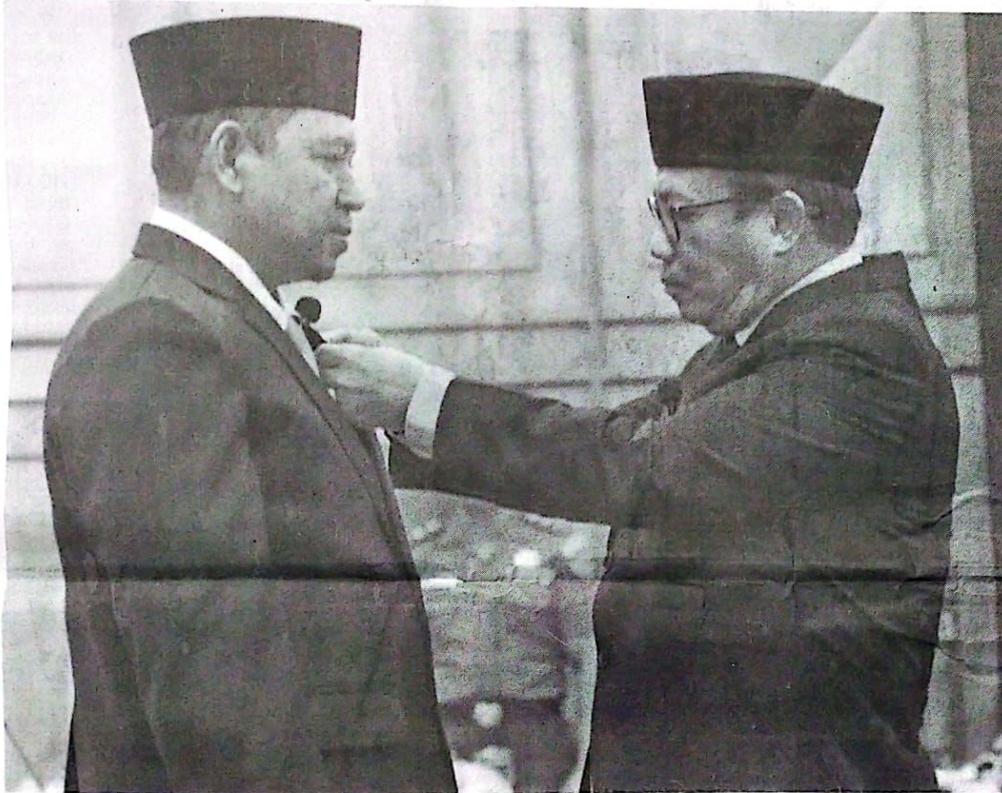
M. ISKAK
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo terkait pelantikan anggota KPPS di Sidoarjo



FIRMA ZUHDI

Hari ini (kemarin, Red) kami melantik anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2024 Pelantikan digelar di tiap kecamatan serempak. Total ada 38.963 petugas yang akan ditempatkan di 5.566 TPS yang ada

Anang Ma'ruf Resmi Dilantik Sebagai PAW Anggota DPRD, Gantikan Atok Ashari



SAH: Ketua DPRD Sidoarjo Usman menyematkan pin sebagai tanda anggota DPRD kepada Anang Ma'ruf.

KOTA-DPRD Sidoarjo kembali melaksanakan pengambilan sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota sisa masa jabatan 2019-2024. Kader PKS Anang Ma'ruf dilantik secara resmi menggantikan Atok Ashari sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Proresi tersebut dipimpin dengan khidmat oleh Ketua DPRD Sidoarjo Usman.

Setelah pengucapan sumpah, tanda resmi pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.

Kesempurnaan acara dirajut dengan penyematan PIN anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo kepada Anang Ma'ruf. Simbolisasi itu menggambarkan dimulainya perjalanan masa jabatan baru yang dipenuhi tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Usman mengucapkan selamat kepada Anang Ma'ruf sambil menekankan urgensi pemahaman tugas sebagai wakil rakyat.

Usman juga menitikpkan harapan agar Anang Ma'ruf mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, baik dalam lingkup pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap semua pihak bersinergi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sidoarjo," katanya.

Sebagai tanda akhir, Usman secara simbolis menyematkan pin DPRD Sidoarjo kepada Anang Ma'ruf. Menandai langkah awal yang penuh harapan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Sidoarjo yang baru. (nis/vga)



Komisi C Pelajari Konsep Smart City ke Kota Banjarbaru

KOTA-Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru. Bertempat di Aula Johan Arifin Diskominfo, kunjungan itu difokuskan pada pemahaman implementasi konsep Smart City yang sukses diterapkan di

Kota Banjarbaru.

Dalam upaya menjadi salah satu kota yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Kota Banjarbaru menjadi rujukan bagi daerah lain. Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Suyarno menegaskan, tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mendapatkan pemaha-

man lebih mendalam terkait strategi dan inovasi yang telah diterapkan oleh Diskominfo Banjarbaru.

Menurut dia, hal itu penting dalam merancang langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemkot Banjarbaru dalam menerapkan konsep Smart City. "Kami ingin belajar dari pengalaman sukses Kota Banjarbaru, agar dapat

kami terapkan di Sidoarjo demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

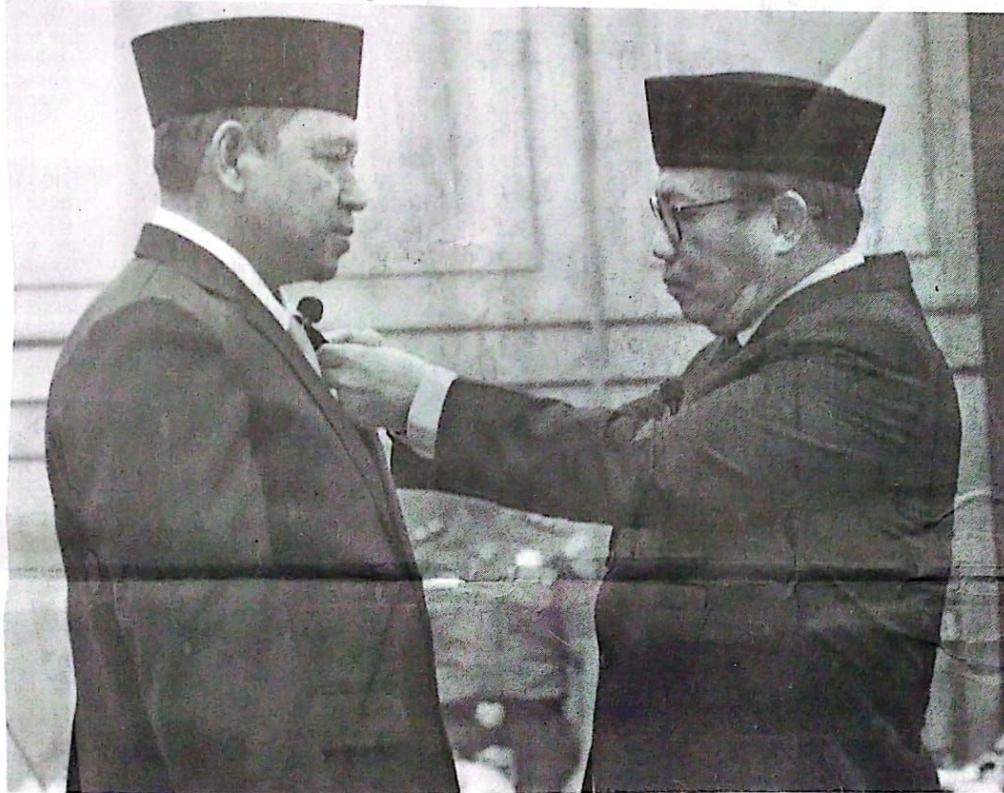
Kunjungan itu juga sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota DPRD Sidoarjo terkait upaya mewujudkan Kota Cerdas (Smart City). Diskominfo Kota Banjarbaru menjadi pusat inspirasi bagi implementasi tek-

nologi informasi dalam pelayanan publik dan pelayanan masyarakat.

Diharapkan, hasil kunjungan dapat membuka wawasan dan memberikan pandangan baru bagi DPRD Sidoarjo dalam mengambil langkah-langkah menuju masyarakat yang lebih sejahtera melalui konsep Smart City. (nis/vga)



Anang Ma'ruf Resmi Dilantik Sebagai PAW Anggota DPRD, Gantikan Atok Ashari



SAH: Ketua DPRD Sidoarjo Usman menyematkan pin sebagai tanda anggota DPRD kepada Anang Ma'ruf.

KOTA-DPRD Sidoarjo kembali melaksanakan pengambilan sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota sisa masa jabatan 2019-2024. Kader PKS Anang Ma'ruf dilantik secara resmi menggantikan Atok Ashari sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Prosesi tersebut dipimpin dengan khidmat oleh Ketua DPRD Sidoarjo Usman.

Setelah pengucapan sumpah, tanda resmi pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah.

Kesempurnaan acara dirajut dengan penyematan PIN anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo kepada Anang Ma'ruf. Simbolisasi itu menggambarkan dimulainya perjalanan masa jabatan baru yang dipenuhi tanggung jawab.

Dalam sambutannya, Usman mengucapkan selamat kepada Anang Ma'ruf sambil menekankan urgensi pemahaman tugas sebagai wakil rakyat.

Usman juga menitikpkan harapan agar Anang Ma'ruf mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, baik dalam lingkup pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap semua pihak bersinergi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sidoarjo," katanya.

Sebagai tanda akhir, Usman secara simbolis menyematkan pin DPRD Sidoarjo kepada Anang Ma'ruf. Menandai langkah awal yang penuh harapan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Sidoarjo yang baru. (nis/vga)



Komisi C Pelajari Konsep Smart City ke Kota Banjarbaru

KOTA-Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru. Bertempat di Aula Johan Arifin Diskominfo, kunjungan itu difokuskan pada pemahaman implementasi konsep Smart City yang sukses diterapkan di

Kota Banjarbaru.

Dalam upaya menjadi salah satu kota yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Kota Banjarbaru menjadi rujukan bagi daerah lain. Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Suyarno menegaskan, tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mendapatkan pemaha-

man lebih mendalam terkait strategi dan inovasi yang telah diterapkan oleh Diskominfo Banjarbaru.

Menurut dia, hal itu penting dalam merancang langkah-langkah yang dapat diambil oleh Pemkot Banjarbaru dalam menerapkan konsep Smart City. "Kami ingin belajar dari pengalaman sukses Kota Banjarbaru, agar dapat

kami terapkan di Sidoarjo demi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kunjungan itu juga sebagai bagian dari upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota DPRD Sidoarjo terkait upaya mewujudkan Kota Cerdas (Smart City). Diskominfo Kota Banjarbaru menjadi pusat inspirasi bagi implementasi tek-

nologi informasi dalam pelayanan publik dan pelayanan masyarakat.

Diharapkan, hasil kunjungan dapat membuka wawasan dan memberikan pandangan baru bagi DPRD Sidoarjo dalam mengambil langkah-langkah menuju masyarakat yang lebih sejahtera melalui konsep Smart City. (nis/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pelayanan Publik Masuk Zona Hijau Kualitas Tertinggi

Ombudsman RI Beri Nilai 95,95

KOTA-Ke pat u h a n penyelenggaraan pelayanan publik Pemkab Sidoarjo mendapat apresiasi dari Ombudsman RI. Lembaga pengawas pelayanan publik pemerintah itu menilai kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Sidoarjo sangat baik. Sehingga masuk dalam kategori kabupaten dengan pelayanan publik zona hijau dengan kualitas tertinggi. Nilai yang diberikan Ombudsman RI kepada Pemkab Sidoarjo tahun 2023 sebesar 95,95. Penilaian itu lebih baik dari tahun sebelumnya yakni 84,46. Naiknya penilaian tersebut menjadikan Sidoarjo masuk dalam lima besar kabupaten/kota di Jatim dengan kepatuhan pelayanan publik zona hijau kualitas tertinggi.

Lima daerah itu yakni Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Nganjuk dan Jember.

Penyerahan piagam penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik tahun 2023 oleh Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang diwakili Asisten III dr Atok Irawan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Rabu, (24/1).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menyampaikan, dengan naiknya penilaian tersebut membawa pelayanan publik Sidoarjo naik kelas dari zona kualitas tinggi menjadi zona hijau kualitas tertinggi.

"Penilaian dari ombudsman RI ini menjadi ukuran kinerja kepatuhan pelayanan publik pemerintah. Pemkab Sidoarjo terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan publiknya.

● Ke Halaman 10



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.



Pelayanan Publik...

Meski belum sempurna kami akan terus berusaha menyempurnakan," ujar Gus Muhdlor sapaannya.

Ada tujuh lokus pelayanan yang menjadi sasaran penilaian Ombudsman RI. Ketujuh lokus itu yakni

pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pelayanan di Puskesmas Taman dan Puskesmas Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lakukan Jemput Bola, Sub PIN Polio Capai 99 Persen

GEDANGAN-Vaksinasi Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio ditargetkan akan tuntas pada pekan ini. Saat ini vaksinasi telah terealisasi sebanyak 99 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Fenny Apridawati mengatakan, imunisasi polio di Sidoarjo ditargetkan tuntas pada Minggu (28/1) nanti. "Saat ini terus kami sweeping

Fenny menyebut jumlah yang melakukan vaksinasi sudah mencapai 290 ribu anak lebih. Jumlah yang hampir memenuhi target, yakni 292.041 anak.

Angka tersebut merupakan target pertama bagi Sub PIN Polio pertama. Sebab nantinya akan ada periode kedua bagi Sub PIN Polio di Sidoarjo yang akan digelar pada tanggal 19 sampai



CEPAT: Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo, Muhammad Atho'llah saat terjun langsung ke masyarakat.

25 Februari.

Karena itu ia merasa optimistis targetnya dapat segera selesai pada Minggu ini. Sebab pihaknya

● Ke Halaman 10



Lakukan Jemput Bola,...

turun langsung secara *door to door* ke rumah warga.

"Kami terjun secara langsung ke desa-desa untuk menysasar ke anak-anak berusia 0 hingga 7 tahun agar seluruhnya mendapatkan imunisasi polio," ujarnya.

Sebelumnya, vaksinasi polio hanya dilakukan di tempat pelayanan kesehatan maupun institusi pendidikan. Seperti puskesmas, polindes, posyandu, PAUD, MI dan lainnya.

Fenny menegaskan, dirinya tidak mau ada anak Sidoarjo lolos dari imunisasi. Sebab, baginya imunisasi polio sangat penting bagi kekebalan tubuh anak.

Karena itu pada Sub Pin periode kedua, pihaknya akan melibatkan berbagai lini. Seperti mahasiswa dan rumah sakit. Semangat gotong royong tersebut sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat bahwa imunisasi Polio itu sangat penting bagi *Healthy Imunity*.

Sementara itu, Kabid Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sidoarjo, Muhammad Atho'llah menjelaskan, imunisasi polio sangat penting bagi anak. Tujuannya untuk mencegah penyakit polio yang kemungkinan terjadi.

"Kegiatan ini digelar serentak di Jateng, Yogyakarta, Sleman dan Jatim," paparnya.

Imunisasi polio digelar lantaran di Jateng dan Jatim ditemukan anak yang positif polio. Sehingga imunisasi polio penting agar terhindar dari penyakit tersebut. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lantik Anggota KPPS Se-Sidoarjo

M. ISKAK
Ketua Komisi
Pemilihan Umum
(KPU) Sidoarjo
terkait pelantikan
anggota KPPS
di Sidoarjo



FIRMA ZUHDI

Hari ini (kemarin, Red) kami melantik anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2024. Pelantikan digelar di tiap kecamatan serempak. Total ada 38.963 petugas yang akan ditempatkan di 5.566 TPS yang ada.”

Jawa Pos

Masih Tuntaskan Instalasi Lampu

Proyek Taman Pedestrian di Kawasan GOR

SIDOARJO – Proyek taman pedestrian di sepanjang Jalan Ponti hingga Jalan Pahlawan di depan GOR Gelora Delta, Sidoarjo, tak kunjung tuntas. Kini masih menyisakan pemasangan instalasi lampu penerangan jalan umum (PJU). Kabid Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingku-

ngan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Hery Santoso menyebut secara fisik pekerjaan sudah tuntas. “Sekarang pemasangan instalasi lampu, kurang itu saja,” katanya. Hery mengakui ada kendala sehingga pengerjaan terlambat dari jadwal. Yakni, terkait pemasangan instalasi kelistrikan lampu PJU yang juga sebagai hiasan di sepanjang trotoar tersebut. “Tenaganya yang mengerjakan

kurang. Kami sudah minta tambah tenaga,” ungkapnya. Selain itu, pemasangan instalasi tersebut butuh tenaga profesional dan cukup memang waktu. Pemasangannya tidak boleh terpisah di tiap titik karena berkaitan dan jadi kesatuan. Karena itu, pelaksana pengerjaan taman tersebut meminta tambahan waktu pengerjaan. Sebelumnya, pihak pelaksana meminta perpanjangan

waktu pengerjaan hingga 20 hari. Namun, ternyata belum tuntas. Karena itu, pelaksana kembali meminta tambahan waktu pengerjaan. “Akhir Januari ini targetnya sudah selesai,” ujarnya. Karena terlambat, sesuai aturan, pelaksana bakal kena penalti denda keterlambatan. “Denda dihitung tiap hari. Semakin lama selesai, dendanya akan semakin banyak,” pungkasnya. (uzi/c17/any)



MASIH MOLOR: Pekerja memasang instalasi listrik di taman area Gelora Delta Sidoarjo kemarin. Pelaksana proyek meminta tambahan waktu hingga akhir bulan.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



RUTAN SURABAYA

SEHAT JASMANI DAN ROHANI: Salah seorang tahanan hendak konsultasi di layanan kejiwaan Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Waru.

Layanan Kejiwaan dan Mental untuk Tahanan dan Narapidana

SIDOARJO – Bukan hanya kesehatan fisik yang menjadi perhatian Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Waru. Kesehatan mental narapidana dan tahanan juga diperhatikan.

Karena itu, sejak 12 Januari mereka membuka layanan kesehatan kejiwaan bagi para narapidana dan tahanan. "Ini adalah bagian komitmen untuk menjalankan layanan kesehatan yang menyeluruh dan berkelanjutan," tutur Karutan Surabaya Wahyu Hedrajati.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Layanan kejiwaan tersebut terwujud berkat kerja sama dengan Universitas Airlangga dan DR da

Soetomo Surabaya. Menurut dia, banyak narapidana dan tahanan yang mengalami masalah kesehatan mental dan jiwa selama proses pemasyarakatan.

"Mungkin karena baru masuk sini, jadi jelas beberapa mengalami stres selama di sini," katanya.

Diharapkan, layanan kesehatan kejiwaan tersebut sedikit banyak bisa membantu untuk menjaga kondusivitas lingkungan rutan. "Ini juga bagian pendekatan proaktif peningkatan kualitas hidup mereka meski berada dalam tahanan," paparnya. (eza/c19/any)

Jawa Pos

S I D O A R J O

DALAM ANGKA

Kasus Narkoba yang Ditangani Satresnarkoba



Kasus Narkoba Menurun

TINGKAT pengungkapan perkara pada 2023 mengalami penurunan 39,65 persen, sedangkan untuk tersangka penurunan sekitar 29,8 persen. Perkara selama 2023 didominasi transaksi sabu-sabu dan pil koplo. (eza/c19/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Target Akhir Pekan 292.042 Anak Tuntas Diimunisasi Polio

SIDOARJO - Pelaksanaan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo ditargetkan tuntas akhir pekan ini. Kadinkes Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, hingga kemarin (25/1) sore capaian vaksinasi sudah 99,8 persen atau sebanyak 289.121 anak usia 0 sampai 7 tahun telah mendapatkan imunisasi novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOVP2).

"Itu sekitar beberapa lagi dari target kami 292.042 anak yang harus mendapat vaksin," katanya. Menurut

dia, untuk memenuhi target tersebut, masih ada rentang waktu hingga Minggu (28/1). Sementara itu, sejak Senin (22/1) Dinkes Sidoarjo bersama puskesmas dan kader kesehatan melakukan jemput bola vaksinasi kepada masyarakat.

"Beberapa anak yang tidak terjangkau pada putaran awal kita datang dan berikan vaksin ke rumah-rumah," tuturnya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang tidak bisa membawa anaknya jauh dari rumah juga bisa mendapatkan imunisasi polio.

Selain menggenjot agar sampai di target 100 persen, Fenny mengatakan bahwa untuk putaran kedua pemberian vaksin polio itu, pihaknya juga sudah bersiap. "Untuk menjangkau lebih banyak lagi dan efisiensi, kami libatkan beberapa pihak," tuturnya.

Mulai organisasi profesi di bidang kesehatan, rumah sakit, hingga mahasiswa. Mereka diharapkan bisa membantu dalam pemberian imunisasi polio di Kota Delta.

"Tahap kedua ini dilaksanakan pada 19 sampai 26 Februari mendatang," jelasnya. **(eza/c6/any)**

Jawa Pos



DITE SURENDRA/JAWA POS

DILEBARKAN: Lalu lintas di pertigaan kawasan industri Safe n Lock kemarin. Kawasan Lingkar Timur merupakan area ekonomi khusus sehingga membutuhkan akses yang memadai.

Perlebar Jalan Lingkar Timur, Dukung Kawasan Ekonomi Khusus

Sebagian Disetujui Pemerintah Pusat

SIDOARJO - Jalan Lingkar Timur akan dilebarkan tahun ini. Sebagian sudah disetujui oleh pemerintah pusat. Sebagian lainnya proses pengusulan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono

mengatakan, Jalan Lingkar Timur dilebarkan dari 12 meter menjadi 20 meter. Dwi menyebut ada dua ruas di sepanjang Jalan Lingkar Timur. Total panjangnya 10,7 kilometer.

"Untuk ruas Banjar Kemantren sampai Prasung sudah disetujui," katanya. Sementara untuk ruas Prasung sampai pertigaan Kecamatan Candi sampai saat ini masih proses pengusulan. "Masih proses

pembahasan usulan," ujarnya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyebut usulan pembangunan Jalan Lingkar Timur sudah disampaikan. Bahkan, dia Selasa (23/1) sudah bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta. Muhdlor menyampaikan perkembangan Sidoarjo sekaligus meminta dukungan infrastruktur di Sidoarjo.

Salah satunya di Jalan Lingkar Timur. Sebab pada 2024

ini, akan ada peningkatan status Kawasan Industri Safe n Lock dan Sidoarjo Rangkah Industrial Estate (SiRIE) dari kawasan industri halal biasa menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) industri halal. Lokasinya berada di Jalan Lingkar Timur.

"Tahun ini Sidoarjo akan memiliki kawasan ekonomi khusus," katanya. Bulan depan seluruh proses peningkatan status tersebut tuntas. Karena

itu, pihaknya memohon dukungan infrastruktur agar Jalan Lingkar Timur bisa dilebarkan sepanjang 10,7 kilometer. Sebab, KEK industri halal Sidoarjo sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri halal nasional.

"Bapak Wapres mendukung penuh berbagai program di Sidoarjo, baik infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia," ucapnya. (uzi/c6/any)

Jawa Pos

Honor 12.633 Kader Kesehatan Dinaikkan

Beri Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

SIDOARJO - Total sebanyak 12.633 kader kesehatan se Kabupaten Sidoarjo yang tahun 2024 ini bakal menerima kenaikan honor. Dari yang semula perbulan menerima honor Rp. 25 ribu menjadi Rp. 30 ribu dan tahun 2024 ini dinaikkan lagi menjadi Rp. 50 ribu perbulan. Pemkab Sidoarjo juga memberikan perlindungan jaminan sosial lewat BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada belasan ribu kader kesehatan itu diberikan lewat CSR perusahaan. Namun tahun 2024 ini sepenuhnya dibiayai dari APBD Sidoarjo.

Bupati Ahmad Muhdlor Ali atau yang akrab dipanggil Gus Muhdlor mengatakan peningkatan honor kader kesehatan merupakan bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo. Oleh karenanya ia meminta kader kesehatan tidak memandang nominal honor yang didapatkan. Akan tetapi perhatian pemerintah terhadap pengabdian kader kesehatan yang selama ini telah membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Sidoarjo.

"Perhari ini perhatian pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap pembangunan kesehatan tidak bisa dibantah lagi, baik pembangunan infrastrukturnya maupun

penunjangnya, terbukti di tahun ini honor kader kesehatan kembali kita naikan,"ucapnya.

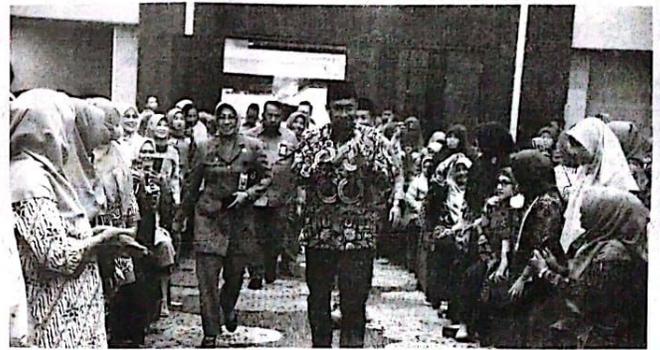
Gus Muhdlor juga berharap pemberian honor seperti ini menjadi semangat para kader kesehatan dan tenaga kesehatan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain itu mereka juga ditugaskan menuntaskan angka stunting.

"Ditahun ini seluruh kader kesehatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo juga akan terproteksi BPJS Ketenagakerjaan,"ujarnya.

Masih kata Gus Muhdlor menambahkan, kader kesehatan mempunyai peran besar bagi pembangunan kesehatan. Mereka adalah ujung tombak pemberian pelayanan kesehatan. Ditangan mereka derajat kesehatan masyarakat Sidoarjo semakin meningkat.

"Saya harap ada regenerasi kader kesehatan meski saya yakin seluruh kader kesehatan yang ada tidak akan mau pensiun sebagai kader kesehatan,"ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Feny Apridawati mengatakan mulai tahun ini kader kesehatan akan menerima honor Rp. 50 ribu perbulan. Selain itu mereka semua juga akan diproteksi dengan BPJS



Bupati Sidoarjo sampaikan kenaikan honor ribuan kader kesehatan

Ketenagakerjaan. Mereka akan diikuti sertakan sebagai pekerja penerima upah. Seluruhnya akan ditanggung Pemkab Sidoarjo.

"Panjenengan diikutkan yang penerima upah, naudzubillih min dzalik, jadi semisal terjadi kecelakaan, santunannya tidak hanya 70 juta namun juga ada bea siswa pendidikan sampai perguruan tinggi,"ujarnya.

Feny mengatakan sebelumnya terdapat 6.728 kader kesehatan yang diikutkan BPJS Ketenagakerjaan melalui CSR PT. Tjiwi Kimia. Mereka kemarin diikutkan sebagai

pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah. Oleh karenanya asuransi kecelakaan meninggal dunia yang diterima hanya sebesar Rp. 42 juta.

"Yang meninggal yang kemarin diikutkan CSR dapatnya Rp. 42 juta, meninggal karena kecelakaan atau tidak itu Rp 42 juta, seperti ibu Bambang hari ini suaminya menerima santunan Rp. 42 juta dari BPJS Ketenagakerjaan," ucap Feny.

Sementara itu Kader Kesehatan Kelurahan Pucanganom Kecamatan Sidoarjo Ernawati tampak bahagia

atas kenaikan honor tersebut. Apalagi ditambah perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk dirinya dan rekan-rekan sejawatnya. Menurutnya hal seperti ini merupakan bentuk perhatian Pemkab Sidoarjo kepada masyarakat Sidoarjo yang ikut berkontribusi dalam pembangunan.

"Alhamdulillah senang sekali yang awalnya 30 ribu menjadi 50 ribu, jadi nambah semangat buat ibu-ibu kader kesehatan untuk terus mengabdikan pelayanan kepada masyarakat,"ucapnya. • Loe

Tahun Ini Honor Kader Kesehatan Naik Lagi

SIDOARJO – Tahun lalu honor kader kesehatan di Sidoarjo naik. Dari Rp 25 ribu menjadi Rp 30 ribu. Tahun ini ada kenaikan lagi. Dari Rp 30 ribu menjadi Rp 50 ribu per bulan. Terdapat 12.633 kader kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo yang menerima kenaikan honor tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Feny Apridawati mengatakan, selain kenaikan honor, kader kesehatan kini diikutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Biayanya ditanggung Pemkab Sidoarjo. Tahun lalu jaminan sosial tersebut masih ditanggung *corporate responsibility* (CSR) dari sejumlah perusahaan di Sidoarjo. Tahun ini ditanggung APBD Sidoarjo.

Mulai tahun ini, para kader kesehatan diikutkan kategori pekerja penerima upah. Dengan demikian, santunannya lebih banyak jika terjadi kecelakaan atau

lainnya. Tahun sebelumnya, para kader kesehatan masih diikutkan kepesertaan kategori pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, kenaikan honor tersebut diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi kader kesehatan. Dia meminta para kader tidak melihat nominalnya. Namun, kenaikan tersebut bentuk apresiasi dan perhatian dari Pemkab Sidoarjo terhadap pengabdian kader selama ini. "Mereka ujung tombak pelayanan kesehatan," katanya.

Salah seorang kader kesehatan M. Junaidi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kenaikan honor tersebut. Sebelumnya, dia dimintai data ter-*update* terkait kenaikan itu. "Untuk cair atau tidaknya belum saya cek. Alhamdulillah, ada apresiasi," ujarnya. (uzi/c7/any)

Pelapor Kecewa



IST/DUTA

TN berambut gondrong saat dikantor Bawaslu Rabu(24/1/24).

Bawaslu Limpahkan ke Dinas PMD

SIDOARJO - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo telah merekomendasikan adanya pelanggaran hukum lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Salah satunya yang dilakukan oleh Badan Pemusyaratan Desa (BPD) Kecamatan Krembung Sidoarjo ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan ataupun pemberian sanksi maupun tindakan. Atas hal ini pelapor atas nama TN merasa kecewa dan mendatangi kantor dinas PMD

“Pelanggaran pemilu itu ada empat jenis yaitu pelanggaran administratif, kode etik penyelenggaraan pemilu, tindak pidana pemilu dan terdapat pelanggaran lainnya”

dan terakhir adalah pelanggaran hukum lain terkait dengan penyelenggaraan pemilu," jelas Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sidoarjo, Moeh Arief, S.Sos kepada sejumlah jurnalis di Kantor Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Rabu (24/1/24) kemarin.

Arief menjelaskan Bawaslu telah melakukan koordinasi dan melakukan rapat pleno terkait laporan dugaan politik praktis yang dilakukan oleh BPD Kecamatan Krembung. Dimana ada undangan atas nama Forum Badan Masyarakat Desa (FBPD) Kecamatan Krembung dengan ketua Teguh Santoso telah mengundang seluruh pengurus RT dan RW se-Kecamatan Krembung untuk menghadiri acara serap aspirasi dan pembagian seragam yang dihadiri oleh Anik Maslachah selaku calon legislatif DPRD Provinsi dari partai PKB dengan agenda bertanggal 7 Januari 2024 kemarin.

"Ini masalah pelanggaran netralitas dan kami sudah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sidoarjo selaku dinas yang mengayomi BPD untuk dapat dilakukan sanksi tindakan. Karena setelah rapat pleno di Bawaslu didapatkan kesepakatan bahwa itu termasuk pelanggaran hukum lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemilu," ucap Arief.

Perlu diketahui, larangan untuk Politik Praktis Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Selain Kepala Desa, perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.

terhadap dalam politik praktis.

Pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Sedangkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 ayat (2) huruf (h) huruf (i) dan huruf (j) undang - undang pemilu : pelaksana dan / atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa. ● Loe

DUTA

Anggota DPRD Sidoarjo Tendang Tanggul Penahan Proyek Betonisasi di Tarik

Jurnalis: Fathur Roziq | Editor: Marno

Rabu, 23 Agustus 2023 20:35



Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko dan Sekretaris Komisi C Mohammad Rojik mengetes kondisi tanggul penahan tanah (TPT) proyek betonisasi jalan di Desa Singogalih--Tarik-Kedungbocok--Mliriprowo, Kecamatan Tarik, pada Rabu (23/8/2023). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KETIK, SIDOARJO – Para legislator DPRD Sidoarjo terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan program-program strategis Pemkab Sidoarjo. Salah satunya, pembangunan infrastruktur jalan beton. Lebih-lebih, Bupati Ahmad Muhdlor telah mewanti-wanti agar pengerjaan jalan beton sesuai target dan perencanaan. Pengawasan harus ketat. Ternyata ada pelaksana proyek dan konsultan yang tidak mematuhi.

Rabu siang (23/8/2023), matahari begitu terik. Beberapa pekerja terlihat sibuk di hamparan jalan beton kawasan Desa Mliriprowo, Kecamatan Tarik. Saat itulah, terlihat rombongan Komisi C DPRD Sidoarjo turun dari mobil. Para wakil rakyat itu melakukan inspeksi mendadak (sidak).



Mereka dipimpin Wakil Ketua Komisi C Anang Siswandoko dan Sekretaris Komisi C Mohammad Rojik. Ada pula anggota komisi bidang pembangunan dan lingkungan itu, seperti Mochammad Sochib, M. Nizar, Bahrul Mustofa Idhom, dan Vike Widya Asroni.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Anang dan anggotanya menuju tanggul penahan tanah (TPT) di sisi jalan beton. Langkahnya tegas. Dia mendatangi titik bangunan TPT yang tampak mencurigakan. Anang lantas menekan pasangan batu kali di TPT itu. Ambrol. Diremasnya campuran semen dan pasir sampai hancur. Wajahnya seketika tampak kesal. *"Lho, opo-opoan iki. (Apa-apaan ini, red),"* ujarnya.

Kaki Anang terlihat menendang pasangan batu dan semen itu. Seketika pasangan ambrol. Hancur dan jatuh ke sawah. Berkeping-keping. Anang pun melangkah ke titik lain. Kondisinya sama. Ditendang sedikit saja, pasangan batu dan semen itu rompal, lalu mengeluarkan debu. *"Crasssshhh. Krosak"*



Semua anggota Komisi C DPRD Sidoarjo pun segera mendekat. Para legislator itu memanggil konsultan pengawas di lokasi. Seorang lelaki muda segera mendekat. Dia berusaha menjawab kekesalan para wakil rakyat itu dengan argumen.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Satu banding berapa ini pasangannya?" tanya Anang.

"Satu banding tiga, Pak," ujar lelaki muda itu.

Baca Juga:

**Pendapatan Pajak Daerah Naik Fantastis, Gus
Muhdlor: Kita Kembalikan ke Masyarakat dalam
Bentuk Pembangunan**

Anang dan Sochib terlihat tambah kesal. Mereka menyatakan tidak mungkin perbandingan semen dan pasir di pasangan TPT itu 1 : 3. Mungkin, malah 1 : 8 atau 1 : 10. Kalau 1 : 3 tidak mungkin dipegang dan ditendang begitu langsung hancur.

"Bagaimana *sampeyan* bekerja sebagai pengawas di sini," ujar Anang lagi. Dia menduga semua pasangan batu, semen, dan pasir di TPT itu sama saja. Campuran tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB).

Petugas konsultan pengawas itu masih terus membela diri. Adu argumen pun tidak terhindarkan. Mereka bersikukuh hanya titik-titik tertentu yang ambrol seperti itu. Yang lain sudah sesuai dengan RAB. Anang semakin kesal.



"Ayo kita buat pasangan 1 : 3. Aku sendiri yang pasang. Kita buktikan hasilnya," kata legislator asal Partai Gerindra tersebut.

Saat itulah Nizar menyahut. "*Wis karuan menengo ae sampeyan, Mas,*" ujar anggota DPRD dari Partai Golkar tersebut. Dia meminta staf konsultan lebih baik diam saja.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Suasana inspeksi mendadak proyek betonisasi jalan di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, oleh Komisi C DPRD Sidoarjo pada Rabu (23/8/2023). Terlihat pula konsultan dan pegawai Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo di lokasi. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Anang Siswandoko pun menyatakan, Komisi C DPRD Sidoarjo tegas merekomendasikan agar bangunan TPT itu dibongkar. Di beberapa titik sudah terbukti tidak memuaskan. Dia memastikan sepanjang TPT itu dikerjakan dengan cara yang sama.

"Kami minta ganti seluruh pasangan batu kali itu. Mestinya 1 : 3, tapi entah berapa itu," tegas dia.

Anang menyatakan, hasil inspeksi mendadak itu menunjukkan banyak sekali kelemahan dalam fungsi konsultan pengawasan. Mereka setiap hari bekerja sehingga semestinya harus terus mengingatkan

kontraktor pelaksana agar bekerja sesuai RAB.

Baca Juga:

[DPRD Sidoarjo Minta Dinas Pendidikan Seriusi Relokasi SMPN 2 Tanggulangin yang Kebanjiran Setiap Tahun](#)

Dia meminta Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) mengevaluasi kinerja konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. DPRD memastikan akan memanggil semua pihak yang terkait proyek tersebut untuk *hearing* di DPRD. Akan ditelusuri. Berapa anggaran proyek tersebut. Siapa konsultan perencananya. Siapa kontraktor pelaksanaanya. Siapa konsultan pengawasnya.

"Buat apa bayar mahal konsultan kalau hasilnya seperti itu," tegas Anang. (*)



DNN TV



☆ Berita Utama

▶ **BERITA TV**

🕒 Terkini

🔥 P

Parkir, Indikasikan Adanya Tindak Pidana Korupsi

Admin

Wednesday, August 9, 2023, August 09, 2023 WIB





Abdul Basith, Direktur SAKA Sidoarjo.

DNN, SIDOARJO – Direktur Study Advokasi Kebijakan dan Anggaran (SAKA), Abdul Basith mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendalami indikasi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan layanan parkir yang dilakukan secara swakelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo di tahun 2020 hingga pertengahan 2022 lalu.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ia yang ditemui di Sidoarjo, Rabu (09/08/2022) sore tadi menjelaskan indikasi tersebut bisa dilihat dari tren penurunan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir di rentang waktu 2017 hingga 2022. "Realisasi pendapatan retribusi parkir selama lima tahun terakhir menurunnya sangat drastis, bahkan di tahun 2020 lalu tidak ada setoran sama sekali ke kas daerah alias nol rupiah," tandas Basith.

Dijabarkannya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos retribusi parkir paling tinggi terjadi pada 2018 sebesar Rp 31,3 miliar. Kemudian pada tahun 2019 pencapaiannya turun menjadi Rp 12,04 miliar setelah dihentikannya program parkir berlangganan.

Parahnya, pada 2020 tidak serupiahpun yang disetorkan Dishub Sidoarjo ke kas daerah.

Padahal di tahun anggaran itu, Pemkab sudah

mengeluarkan dana untuk membayar honor jukir

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

sebesar Rp 6,88 miliar. Bilangan rupiah itu

belum termasuk pembiayaan untuk kebutuhan lain yang terkait dengan layanan parkir seperti pengadaan tiket, rambu dan sebagainya.

“Faktanya ada penarikan retribusi pada masyarakat pengguna jasa parkir. Terus kemana uang yang dipungut oleh para jukir itu disetorkan? Karena inilah kami yakin ada indikasi kebocoran pendapatan daerah serta potensi tindak pidana korupsi,” beber Basith.

LIHAT JUGA

- **Pemdes Telat Ajukan Permohonan, Sidokepong Tak kebagian Kuota di PTSL...**
- **Dinkop Sidoarjo Bekukan Pencairan Dana Kurma untuk 37 Kelompok yang Berafiliasi...**
- **Ada Jokowi, Gapeksi Tunda Aksi**



Salah satu titik parkir di wilayah krian



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

08:16:03

0.47 KB/S Vo LTE-B

KANAL

DNN TV



Berita Utama

BERITA TV

Terkini



Pada tahun anggaran 2021, APBD Sidoarjo mematok target pendapatan daerah dari sektor ini sebesar Rp 16 miliar. Untuk meraihnya, DPRD membekali Dishub dengan sejumlah anggaran untuk memenuhi biaya pengelolaan sebagaimana yang diterapkan di tahun sebelumnya.

“Tapi nilai pemasukan yang berhasil direalisasikan hanya Rp 1,68 miliar atau sekitar 10,52% dari target terpasang,” katanya lagi. Angka pendapatan itu kembali melorot di 2022 dengan mencatatkan Rp 554,2 juta hingga pertengahan tahun.

Dengan mengacu pada data-data ini saja seharusnya APH sudah bisa melakukan penyelidikan yang mendalam untuk mendapatkan fakta terhadap kemungkinan timbulnya kerugian negara. Apalagi saat ini kasus tersebut juga sudah ditangani Polda

Jatim berdasarkan pengaduan yang disampaikan masyarakat.

“Hilangnya potensi pendapatan daerah seperti itu tidak bisa didiamkan. Padahal uang itu sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas pemuda asal Waru (hans/nram)



Pemkab Sidoarjo Gelar Screening Mata Dan Operasi Katarak Gratis Untuk 190 Warga Sidoarjo

REDAKSI 25 JANUARI 2024 15:54:11





SCREENING - Sebanyak 190 orang ikut screening mata dan operasi katarak gratis digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (25/01/2024).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Semarak memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke 165 Tahun 2024 diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya kegiatan sosial screening mata dan operasi katarak gratis. Baznas Sidoarjo sebagai penyelenggara kegiatan menggandeng RSI Siti Hajar Sidoarjo.

Kegiatan screening mata dan operasi katarak gratis itu digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (25/01/2024). Dalam screening mata ini, terdapat sebanyak 190 orang yang ikut.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan akses kesehatan bagi masyarakat Sidoarjo sudah menjadi komitmennya sejak awal. Tahun 2024 ini, Universal Health Coverage (UHC) kembali dijalankan. Pemkab Sidoarjo kembali mengcover jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bagi warga Sidoarjo.

"Sejak awal Tahun 2024 ini, Kabupaten Sidoarjo sudah menjalankan UHC lagi. Ini harus dimanfaatkan dengan baik," ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini kepada republikjatim.com, Kamis (25/01/2024).



Gus Muhdlor menjelaskan akses kesehatan akan dipastikan berjalan dengan baik.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
Pemerataan pembangunan kesehatan terus

dilakukan. Pelayanan kesehatan juga akan terus ditingkatkannya. Terbukti dengan peningkatan status RSUD Sidoarjo dari tipe B menjadi tipe A. Dengan berubahnya status ini, RSUD Sidoarjo ditetapkan sebagai tempat pelayanan rumah sakit rujukan tertinggi.



"Kabupaten Sidoarjo menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mempunyai rumah sakit tipe A," ungkap Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Gus Muhdlor berharap peningkatan pelayanan kesehatan dapat diikuti rumah sakit daerah lainnya. Setelah itu, dia berencana menerapkan sistem holding rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo. Dengan sistem itu manajemen seluruh RSUD Sidoarjo dibawah satu kontrol induk.

"Harapan kami yang RSUD Sidoarjo naik A, RSUD Sibar naik B dan kita bangun di tiga kawedanan sekaligus rumah sakit tipe D dan akan diterapkan sistem holding," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.





Sementara Ketua Baznas Sidoarjo, M Chasbil Azis Salju Sodar menilai antusiasme masyarakat Sidoarjo mengikuti screening mata dan operasi katarak gratis sangat luar biasa. Dari yang semula ditarget 150 orang menjadi 190 orang.

"Antusiasme warga sangat luar biasa, Insyaallah ini ada 190 peserta screening mata dan operasi katarak gratis ini," katanya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua Baznas Sidoarjo yang akrab disapa Gus Jazuk itu menguraikan skema pembiayaan screening mata dan operasi katarak itu melalui BPJS Kesehatan. Namun BPJS Kesehatan ini merupakan CSR perusahaan yang akan tercover selama satu tahun.

"Setelah satu tahun BPJS Kesehatan ini diputus, tidak ada tanggungan kepada pesertanya," urainya.



Gus Jazuk juga mengungkapkan akan ada program BPJS Ketenagakerjaan bagi seribu marbot masjid atau pengurus masjid.

Rencananya, program itu akan disalurkan bersamaan dengan pengajian akbar Gus Iqham tanggal 7 Februari 2024 di MPP Lingkar Timur.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

"Nanti kita akan memberikan BPJS

Ketenagakerjaan kepada seribu marbot masjid dan dhuafa yang Insyaallah besok diberikan kepada perwakilan marbot masjid saat pengajian akbar dengan Gus Iqdam," pungkasnya. Hel/Waw

Pelayanan Publik Sidoarjo Zona Hijau Kualitas Tertinggi, Ombudsman RI Beri Nilai 95,95

REDAKSI 25 JANUARI 2024 15:15:44



Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menerima penghargaan Pelayanan Publik Sidoarjo Zona Hijau Kualitas Tertinggi, Ombudsman RI Beri Nilai 95,95.

Sidoarjo (republikjatim.com) - Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendapat apresiasi dari Ombudsman RI. Lembaga pengawas pelayanan publik pemerintah itu, menilai kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Sidoarjo sangat baik. Sehingga masuk dalam kategori kabupaten dengan pelayanan publik zona hijau dengan kualitas tertinggi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Nilai yang diberikan Ombudsman RI kepada Pemkab Sidoarjo Tahun 2023 sebesar 95,95. Penilaian itu lebih baik dari tahun sebelumnya yakni 84,46. Naiknya penilaian ini, menjadikan Sidoarjo masuk dalam 5 besar kabupaten/kota di Jatim dengan kepatuhan pelayanan publik zona hijau kualitas tertinggi. Lima kabupaten/kota itu yakni Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Nganjuk dan Jember.

Penyerahan piagam penghargaan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Tahun 2023 oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih kepada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali yang diwakili Asisten III dr Atok Irawan di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Rabu (24/01/2024).

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan dengan naiknya penilaian itu membawa pelayanan publik Sidoarjo naik kelas dari zona kualitas tinggi menjadi zona hijau kualitas tertinggi.

"Penilaian dari Ombudsman RI ini menjadi ukuran kinerja kepatuhan pelayanan publik pemerintah. Pemkab Sidoarjo terus melakukan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

publik. Meski belum sempurna, kami akan terus berusaha menyempurnakannya." ujar Bupati

berusaha menyempurnakannya, ujar Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor, Kamis (24/01/2024).

Terdapat 7 lokus pelayanan yang menjadi sasaran penilaian Ombudsman RI. Ketujuh lokus itu yakni pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pelayanan di Puskesmas Taman dan Puskesmas Sidoarjo.

Mokhammad Najih menyampaikan penilaian kepatuhan akan dikembangkan menjadi Opini Pengawasan Pelayanan Publik. Tidak semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mendapat piagam penghargaan dari Ombudsman RI, meskipun dalam zonasi kepatuhannya mendapatkan Zona Hijau.

"Hasil dari Penilaian Kepatuhan diperuntukkan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan," kata Najih.



Seluruh kabupaten/kota diharapkan Najih masuk ke dalam Zona Hijau. Bahkan, lebih banyak lagi daerah masuk ke dalam 10 besar. Pencapaian ini semoga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan amal baik untuk masyarakat bangsa dan negara.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Tetap terus bersemangat kepada garda terdepan, seluruh jajaran pelayan masyarakat," katanya.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur Agus Muttaqin menegaskan khusus Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 dari total 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur terdapat 15 Kabupaten/kota yang masuk dalam Zona Hijau.

Sedangkan, untuk Tahun 2023 Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami perbaikan dan peningkatan dengan total 36 Kabupaten/Kota di Jawa Timur masuk ke dalam Zona Hijau. Hal itu baik dengan Kualitas Tinggi dan Tertinggi, dan hanya dua yang masuk ke dalam Zona Kuning.

"Kami mengapresiasi dari beberapa Kabupaten/Kota yang kita nilai. Sejauh ini berkoordinasi dengan baik. Hampir 98 persen daerah Jawa Timur masuk ke dalam Zona Hijau dan berharap dapat dipertahankan dan ditingkatkan," pungkasnya. Hel/Waw